

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bachtiar Maryati, Buku Ajar Hukum Perikatan, (Pekanbaru, Witra Irzani, 2007)
- Diby Purnomo Serfianto, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, Kitab hukum bisnis property, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)
- Gunanegara, Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law (Jakarta: Tatanusa, 2018),
- Harjono Dhaniswara K, Hukum Properti, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2016)
- HS, Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Miru Ahmadi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982)
- Muhamad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya, 1992)
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermaal, 2002)
- Santoso Urip, Hukum Perumahan, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014)
- Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermassa, 1987)
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Ui Press: Jakarta, 1984)
- Sajipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas), 2003
- Tim Penulis Leks & Co, Perbuatan Hukum Real Estat Bagian 1 Hukum Pertanahan, Perumahan, dan Rumah Susun, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017)
- Wuria Dewi Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015)
- Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta, " Hukum Bisnis Properti di Indonesia " (Jakarta: Grasindo, 2017)

JURNAL

Dolfi Sandag,” Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengembang Perumahan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011”, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus

DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v3i2.7319>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3838)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6624)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5
Tahun 2015 tentang Izin Lokasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Website/Internet:

Admindpu, "Rumah, Perumahan, dan Permukiman",
<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/52/rumah-perumahan-dan-permukiman> diakses pada 24 Juli 2021

Admindpu, "Refresh and Review: Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB)",
<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/249/refresh-and-review-dasar-hukum-izin-mendirikan> bangunan-imb, diakses pada 27 Juli 2021

Albert Aries, "Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Alat Bukti",
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53d8fec20b060/perjanjian-pengikatan> jual-beli-sebagai-alat-bukti, diakses pada 23 Juli 2021.

Badan Pusat Statistik Indonesia, "BPS: 270,20 juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020",
<https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>, diakses pada 15 Agustus 2021

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan" Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2020",
<https://data.pu.go.id/sites/default/files/Informasi%20Statistik%20Infrastruktur%20PUPR%20Tahun%202020.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2021

Imam, "Investasi Rumah,Tips, Keuntungan dan Rekomendasinya",

<https://www.rumah123.com/panduan-properti/tips-properti-78930-tips-investasi-rumah-dan-keuntungannya-id.html>, diakses pada 24 Juli 2021

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Perumahan, "Sejarah Singkat Kebijakan Perumahan di Indonesia",

<https://perumahan.pu.go.id/article/101/sejarah>, diakses pada 24 Juli 2021

Parta Ibeng, "Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Beserta Tujuannya" Pendidikan.co.id

<https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/> , diakses pada 26 Juli 2021

Perumnas, "Tentang Perumnas" <https://perumnas.co.id/> diakses pada 25 Oktober 2021

Rasyid Abdul, "Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"

<https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/>, diakses pada 20 Februari 2022

Rumah123,"Investasi Rumah,Tips, Keuntungan dan Rekomendasinya",

<https://www.rumah123.com/panduan-properti/tips-properti-78930-tips-investasi-rumah-dan-keuntungannya-id.html>, diakses pada 24 Juli 2021

Shanti Rachmadsyah," Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)",

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif->, diakses pada 27 Juli 2021

Vonis Bui Seumur Hidup Tindak Pidana Korupsi", <http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2021

Referensi lain-lain:

Diklat Penyelenggaraan Rumah Swadaya modul 10 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembang Sumber Daya Manusia “Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyedia PSU

Universitas Pelita Harapan, Standart Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2021)

